



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTONO RUSTONO**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **94985**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.572.082.000

1. Tanah Seluas 1500 m2 di SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 309.155.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 332.514.000
4. Tanah Seluas 2312 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
5. Tanah Seluas 1445 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
6. Tanah Seluas 6620 m2 di SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 47.333.000
7. Tanah Seluas 20010 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
8. Tanah Seluas 10000 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/75 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 284.955.000
10. Bangunan Seluas 63 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 581.125.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 510.000.000



1. MOBIL, TOYOTA WISH MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI	
Rp. 180.000.000	
2. MOBIL, --- MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI	
Rp. 80.000.000	
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI	
Rp. 250.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 480.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 7.673.761
F. HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total	Rp. 2.569.755.761
III. HUTANG	Rp. ---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 2.569.755.761

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.